

Wamen ATR Tinjau Potensi Pengembangan dan Permasalahan Jawa Barat Selatan

Anton Atong Sugandhi - PANGANDARAN.INDONESIASATU.CO.ID

Apr 29, 2021 - 02:53



PANGANDARAN JAWA BARAT - Setelah melihat di lapangan, ada niat yang kuat dari pemkab pangandaran untuk melakukan pengembangan, khususnya sektor Parawisata, " kata Wakil menteri Agraria dan Tata Ruang, Surya Tjandra sesuai pertemuannya dengan bupati pangandaran, Kamis 29/04/2021.

Dikatakan Surya bahwa, sekarang Agraria danTata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi kementrian, maka dalam kesempatan ini

saya sebagai Wamen melakukan kunjungan kerja ke beberapa wilayah di Pulau Jawa bagian selatan, ya salahsatunya kunjungan ke Kabupaten Pangandaran.

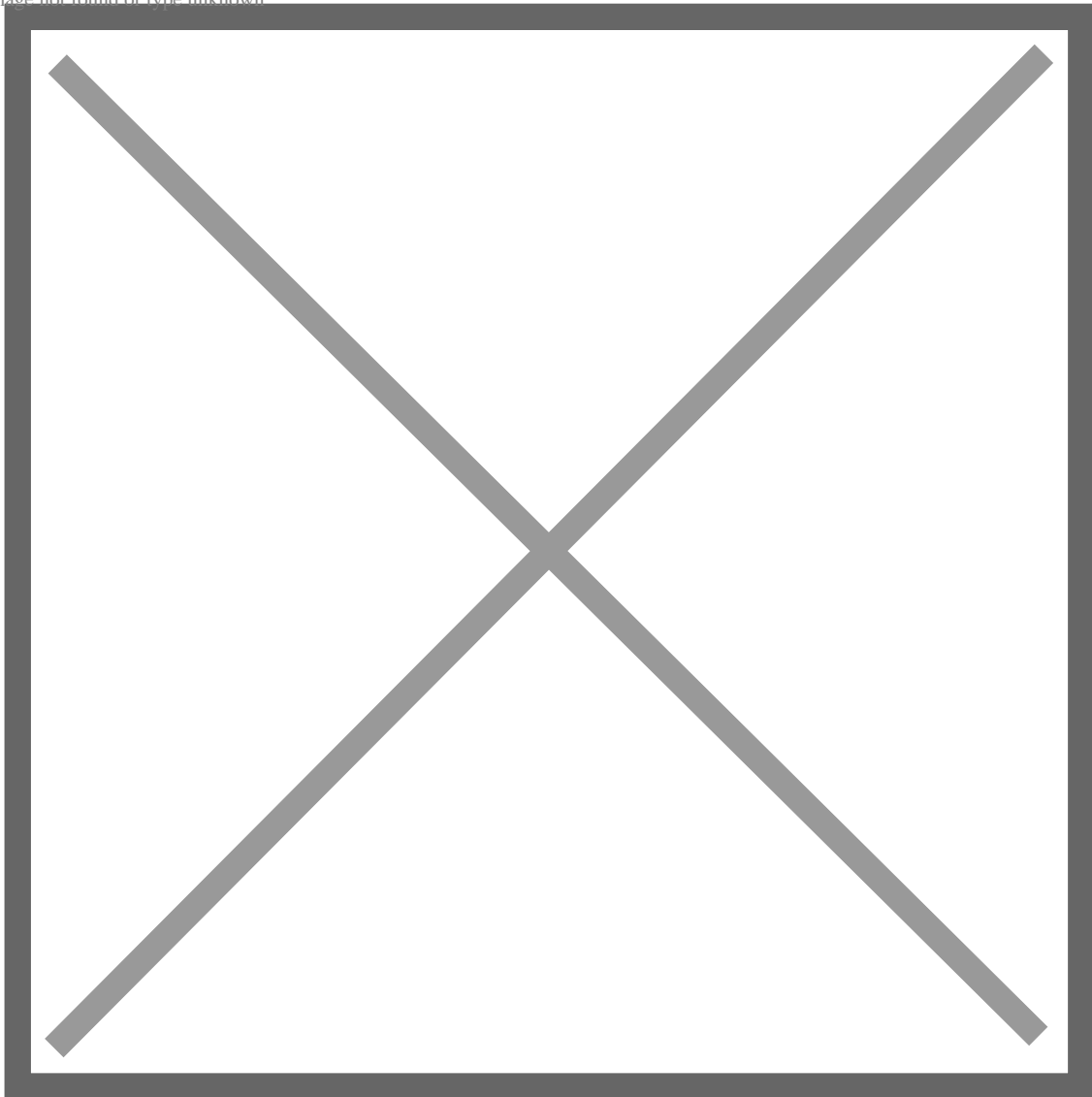
Sebelum bertemu dengan pak Bupati Pangandaran, saya yang juga didampingi Kepala Kantor BPN Pangandaran meninjau pantai Madasari yang terletak di sebelah barat wilayah Kabupaten Pangandaran tepatnya di Kecamatan Cimerak, " katanya.

Menurutnya, untuk memanfaatkan secara optimal sepanjang pantai yang 91 kilometer itu butuh pemahaman tata ruang yang baik, ya, karena potensi rawan bencananya juga besar, intinya bisa di bangun tetapi harus terbatas juga mitigasi bencananya juga harus kuat," kata Surya.

Lalu tambah Surya, kantor BPN harus bekerja lebih pro aktif, pasalnya dulu hanya BPN namun sekarang sudah ditambah ada Tata Ruang nya.

Nanti, dalam perencanaan, akan kita rekomendasikan, dengan

Image not found or type unknown



pemberian haknya, kita berikan kepastian hukum agar masyarakat bisa melakukan investasi lebih banyak lagi, ya dengan solusi itulah perekonomian akan bergerak," kata Surya.

Dirinya berharap, kolaborasi ini bisa dituntaskan, perlu strategi dengan memulai program PTSL di sepanjang pantai Pangandaran, agar hak kepemilikannya tuntas.

Kita juga akan mendorong pelepasan kawasan hutan dari lahan Perhutani yang sudah dikuasai oleh masyarakat, ya, karena telah memberikan manfaat sekian puluh tahun kepada masyarakat.

Dalam kesempatan ini pula perlu saya sampaikan bahwa, bapak Presiden Jokowi juga ingin ada penyelesaian dengan adanya kepastian hak bagi masyarakat yang berada dekat dengan kawasan hutan," ujarnya.

Lanjut Surya, mulai tahun 2019 sudah ada 13 kabupaten/kota di Jawa Barat yang sudah terdeteksi, sedangkan untuk di wilayah Priangan Timur, ya karena sudah ada MOU antara dua gubernur, maka kita fokus di wilayah Kab Ciamis, Pangandaran dan Kab Cilacap Jawa Tengah.

Sementara untuk wilayah Kab Garut beserta kab Sukabumi sudah ada program kawasan strategis nasional.

Juga di tiga daerah, Ciamis, Pangandaran dan Cilacap sudah ada kawasan strategis nasional.

Kalau di wilayah Yogyakarta ada tiga kabupaten yaitu Gunung Kidul, Wonogiri dan Pacitan," ungkapnya.

Sementara Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata menyampaikan, sebenarnya ada banyak persoalan terkait pertanahan, yang mana menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan ketika diusulkan ke pemerintah pusat maupun provinsi.

"Lahan Perhutani yang produktif di Pangandaran sangat luas, bahkan hamparan sawah hingga puluhan hektar berada dalam pengelolaan Perhutani, juga masalah tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah habis masa berlakunya," kata Jeje.

Dia juga mengatakan bahwa, baru 8 tahun kabupaten Pangandaran sebagai kabupaten baru, tentunya harus bekerja keras untuk membangun infrastruktur jalan, rumah sakit, peningkatan gedung puskesmas serta pelayanan masyarakat, seperti meningkatkan pendidikan dengan menggratiskan biaya pendidikan serta pelayanan kesehatan gratis, " imbuhnya.

Diskusi ini dihadiri oleh Wakil Bupati Pangandaran Ujang Endin Indrawan, Sekda Kusdiana, Asisten I Rida Nirwana serta sejumlah pejabat Pemkab Pangandaran. (Anton AS)